

Eksistensi Etnis Cina di Bawah Pemerintahan Orde Baru, 1966-1998

Ihzanda Sibawati

Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: ihzandashibawati@students.unnes.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi etnis Cina di Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru yaitu pada 1966-1998, suatu periode yang ditandai dengan kebijakan asimilasi dan kontrol ketat terhadap kelompok etnis minoritas. Pemerintah Orde Baru, yang dipimpin oleh Soeharto, menerapkan berbagai regulasi yang membatasi kebebasan berbudaya dan identitas etnis Cina, seperti pelarangan penggunaan bahasa Mandarin di ruang public, pembatasan tradisi budaya, serta perubahan nama yang di Indonesiakan. Diskriminasi sistematis dan sentimen anti Cina diperparah oleh kebijakan ekonomi yang ambigu, di mana meskipun etnis Cina berperan penting dalam sektor ekonomi, mereka tetap menghadapi stereotip negatif dan tuduhan monopoli ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis dokumen untuk mengeksplorasi dampak kebijakan Orde Baru terhadap kehidupan sosial ekonomi dan identitas budaya etnis Cina. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdiskriminasi, etnis Cina mengembangkan berbagai strategi adaptasi, termasuk penyesuaian identitas dan integrasi ekonomi yang lebih kuat, untuk bertahan dalam lingkungan yang represif. Studi ini juga mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan asimilasi bertujuan untuk menghapus perbedaan etnis, etnis Cina tetap mampu mempertahankan aspek tertentu dari identitas budaya mereka, baik secara terbuka maupun tertutup. Penelitian ini menekankan perlunya refleksi terhadap sejarah diskriminasi terhadap etnis Cina dan pentingnya membangun kebijakan inklusif yang menghargai keragaman sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi di Indonesia pasca Orde Baru.

Kata Kunci: Etnis Cina; Orde Baru; Identitas Budaya

Abstract

This research aims to examine the existence of ethnic Chinese in Indonesia under the New Order government, namely in 1966-1998, a period marked by policies of assimilation and strict control over ethnic minority groups. The New Order government, led by Suharto, implemented various regulations that limited cultural freedom and Chinese ethnic identity, such as prohibiting the use of Mandarin in public spaces, limiting cultural traditions, and changing names to Indonesians. Systematic discrimination and anti-Chinese sentiment are exacerbated by ambiguous economic policies, where although ethnic Chinese play an important role in the economic sector, they still face negative stereotypes and accusations of

economic monopoly. This research uses a qualitative approach with literature study methods and document analysis to explore the impact of New Order policies on the socio-economic life and cultural identity of ethnic Chinese. The findings in this study indicate that despite discrimination, ethnic Chinese developed various adaptation strategies, including identity adjustment and stronger economic integration, to survive in a repressive environment. This study also reveals that although the assimilation policy aimed to erase ethnic differences, ethnic Chinese were still able to maintain certain aspects of their cultural identity, both openly and privately. This research emphasizes the need to reflect on the history of discrimination against ethnic Chinese and the importance of building inclusive policies that respect diversity as part of reconciliation efforts in post-New Order Indonesia.

Keywords: Chinese Ethnic; Orde Baru; Cultural Identity



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Saat ini perkembangan jumlah etnis Tionghoa di Indonesia sudah meningkat pesat terutama di daerah kota-kota besar. Perkembangan yang pesat tersebut tentu saja memiliki latar belakang yang mendukung. Seringkali kita bertanya bagaimana bisa di daerah kita terdapat banyak orang Tionghoa? Apa yang terjadi di masa lalu sehingga menyebabkan mereka banyak menetap disini? Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentunya kita juga sering sekali mendengar tentang peristiwa tidak mengenakkan yang terjadi di masa lalu yang juga mewarnai Sejarah keberadaan warga etnis Tionghoa di Indonesia. Dari mulai peristiwa perang, pemberontakan, hingga pembantaian yang melibatkan orang etnis Cina. Lalu, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Apa yang mengakibatkan adanya peristiwa-peristiwa tersebut? Bukti arkeologis menunjukkan adanya interaksi antara Tiongkok dan nusantara sejak zaman prasejarah. Temuan benda-benda seperti tembikar atau kapak batu di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan adanya kontak perdagangan antara kedua bangsa tersebut. Sementara itu, menurut sejarah, kedatangan pertama etnis China ke nusantara tercatat pada abad ke-14 masehi (Atabik, 2016). Perdagangan cina telah menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di nusantara seperti kerajaan Sriwijaya dan Tarumanegara (Triwahyuni, et al., 2022). Pada saat itu mereka datang untuk berdagang berbagai komoditas seperti sutra, keramik, dan teh ke nusantara, dan mereka menukar barang-barang tersebut dengan rempah-rempah, kayu gaharu, dan emas. Hubungan perdagangan ini berhubungan dengan adanya catatan-catatan dari dinasti-dinasti Cina, seperti dinasti Tang yang menggambarkan nusantara sebagai pusat perdagangan yang penting.

Selama periode ini kedatangan etnis China meningkat seiring dengan perkembangan jalur sutra maritim. Banyak pedagang Cina yang menetap di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Palembang, Gresik, Lasem, dan Tuban. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga berinteraksi dengan penduduk lokal, menikah, dan membentuk komunitas-komunitas kecil. Pengaruh Cina dalam seni, budaya, dan teknologi, mulai terlihat seperti dalam arsitektur candi-candi dan teknologi pengolahan logam. Kedatangan etnis Cina secara besar-besaran terjadi pada masa

kolonial terutama di bawah pemerintahan kolonial Belanda yaitu VOC. Pada abad ke-17, VOC mengundang para pedagang dan pekerja dari Cina untuk membantu mengembangkan ekonomi kolonial (Atabik, 2016). Mereka dipekerjakan dalam berbagai sektor seperti perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Komunitas ini berkembang pesat di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Namun, dengan meningkatnya jumlah mereka, muncul pula ketegangan etnis dan kebijakan diskriminatif dari pemerintah kolonial. Pada awal abad ke-20 komunitas Cina di Indonesia mulai menunjukkan kesadaran politik dan ekonomi yang lebih besar. Mereka mendirikan vihara, sekolah-sekolah, surat kabar, dan organisasi sosial. Pada masa ini, Cina memainkan peran penting dalam ekonomi Hindia Belanda sebagai pedagang, pengusaha, dan banker. Namun, kebijakan kolonial yang diskriminatif dan munculnya nasionalisme Indonesia mulai mempengaruhi posisi mereka dalam masyarakat. Pada masa kependudukan Jepang, etnis Cina mengalami masa sulit banyak dari mereka yang dicurigai dan menja di target represi oleh Jepang karena dianggap pro Tiongkok atau Pro Barat.

Indonesia merupakan negara dengan beragam etnis, budaya, dan agama yang telah menja di bagian integral dari sejarah panjang pembentukan identitas nasional. Salah satu kelompok etnis yang memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia adalah etnis Cina. Namun, perjalanan sejarah etnis Cina di Indonesia tidak terlalu mulus. Pada periode Orde Baru, mereka menghadapi berbagai tantangan politik, sosial, dan budaya yang mempengaruhi eksistensi dan peran mereka dalam masyarakat. Periode baru dibawah pimpinan Soeharto merupakan masa yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, terutama terkait dengan upaya konsolidasi kekuatan politik dan pembangunan ekonomi. Namun, dalam konteks hubungan antara etnis, khususnya bagi etnis China, periode ini juga dikenal dengan kebijakan asimilasi yang ketat, diskriminasi, dan marginalisasi sistematis. Setelah peristiwa G30S PKI 1965 yang menyebabkan pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto, etnis Cina secara tidak langsung terpengaruh oleh kebijakan anti komunis yang dilakukan oleh Orde Baru. Hal ini disebabkan oleh asumsi yang keliru bahwa etnis Cina memiliki afiliasi kuat dengan komunisme, karena kedekatan kultural dan sejarah mereka dengan Tiongkok yang pada saat itu adalah negara komunis.

Masa Orde Baru merupakan periode yang sangat menentukan dalam sejarah politik, ekonomi, dan sosial Indonesia. Setelah berakhirnya Orde Lama yang ditandai oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi, pemerintahan Soeharto menawarkan stabilitas dan pembangunan sebagai janji utama dalam membangun negara yang kuat dan sejahtera. Pemerintah Orde Baru berfokus pada stabilisasi ekonomi melalui kebijakan yang didukung oleh lembaga internasional, serta pada upaya menciptakan iklim politik yang dikendalikan dengan kuat oleh negara melalui sentralisasi kekuasaan. Pada masa ini, pembangunan ekonomi menja di prioritas utama, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang difokuskan pada pertumbuhan, industrialisasi, dan pencapaian Swasembada pangan. Namun, keberhasilan pembangunan tersebut seringkali diiringi dengan meningkatnya kontrol otoriter pemerintah terhadap masyarakat dan pembatasan kebebasan politik. Sistem politik yang didominasi oleh Golongan Karya (Golkar) dan dukungan militer memastikan stabilitas politik, tetapi juga menciptakan ruang yang sangat terbatas bagi oposisi politik.

Selain itu, selama periode ini juga terjadi pembatasan terhadap ekspresi kebudayaan dan identitas kelompok etnis agama tertentu, terutama etnis Cina, yang mengalami diskriminasi secara sistematis. Kebijakan asimilasi dipromosikan, dan manifestasi budaya Tionghoa dilarang serta secara formal dalam kehidupan public. Meskipun demikian, masa Orde Baru juga merupakan masa modernisasi yang pesat, dengan infrastruktur dan pen di dikan yang semakin berkembang. Namun, seiring dengan melemahnya legitimasi politik pada akhir 1990-an, yang dipicu oleh krisis ekonomi Asia, korupsi yang merajalela, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang semakin represif, rezim Soeharto akhirnya jatuh pada tahun 1998. Masa transisi dari Orde Baru menuju era reformasi ini menja di titik balik dalam sejarah modern di Indonesia.

Dengan latar belakang ini, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai dinamika social, politik, dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru, serta dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintahan yang diterapkan pada masa itu terhadap perkembangan masyarakat hingga saat ini. Dalam makalah ini, akan dibahas secara mendalam mengenai eksistensi etnis Cina di Indonesia pada masa Orde Baru. Fokus utamanya adalah bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi kehidupan social, ekonomi, dan budaya etnis Cina, serta bagaimana mereka berjuang untuk bertahan dan beradaptasi di tengah-tengah politik dan sosial yang ada. selain itu kajian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana warisan dari era Orde Baru terhadap hubungan etnis di masa kini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang sejarah dan dampak kebijakan Orde Baru terhadap kelompok etnis minoritas di Indonesia, khususnya etnis Cina, serta menggambarkan peran penting mereka dalam membentuk dinamika social, politik, ekonomi di Indonesia sepanjang periode tersebut. Melalui kajian ini, penting untuk menyoroti bagaimana kekuasaan politik dan kebijakan yang diterapkan pemerintah dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari kelompok minoritas, serta bagaimana mereka mampu menavigasi tantangan yang ada untuk mempertahankan identitas dan eksistensi mereka. Eksistensi etnis Cina pada masa Orde Baru bukan hanya cerita tentang penindasan dan marginalisasi, tetapi juga tentang ketahanan dan adaptasi di tengah kon disi yang sulit.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo (2013) ter diri dari empat Langkah, yaitu heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis berguna untuk menganalisis dampak kebijakan-kebijakan Orde Baru terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia, terutama masyarakat etnis Cina. Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengkaji perubahan pola hubungan social, distribusi kekuasaan, serta bagaimana kelompok-kelompok tertentu diberlakukan selama rezim tersebut. Pada penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis tentang bagaimana diskriminasi terhadap etnis cina terjadi di, bagaimana asimilasi dipaksakan, serta bagaimana perubahan-perubahan dalam struktur sosial mempengaruhi dinamika masyarakat secara luas.

Hasil dan Pembahasan

Pada masa Orde Baru, terdapat dua jenis orang Tionghoa di Indonesia, yaitu Cina Totok dan Cina Peranakan. Perbedaan antara Cina Totok dan Cina Peranakan di Indonesia mencerminkan tingkat asimilasi mereka dalam masyarakat pribumi. Cina Totok adalah orang-orang Tionghoa yang masih mempertahankan identitas dan bahasa leluhur. Khususnya, generasi pertama mereka, yaitu yang terlahir di Cina atau memiliki hubungan budaya yang kuat dengan negara asal mereka. Mereka juga sering menggunakan bahasa ibu mereka, seperti bahasa Hokkian, dan gaya hidup sehari-hari yang sangat terpengaruh tra di Tionghoa asli. Sementara itu, Cina Peranakan adalah orang Tionghoa yang lahir di Indonesia dan sering kali berasal dari perkawinan campuran. Mereka telah terasimilasi dalam hal Bahasa dan juga budaya, dan lebih memilih untuk mengidentifikasi diri dengan Indonesia (Lan, 2012). Meskipun begitu, kedua kelompok ini berasal dari latar belakang etnis yang sama, perbedaan utama di antara mereka mencakup orientasi budaya, bahasa, dan hubungan sosial. Secara umum, Cina Peranakan lebih terhubung ke lingkungan lokal dan telah terpengaruh banyak aspek budaya pribumi, termasuk bahasa dan adat istiadat. Sementara itu, Cina Totok lebih mempertahankan identitas etnis yang lebih kuat dengan Cina, yang kadang-kadang menyebabkan keterasingan dari masyarakat Indonesia serta dari kelompok Peranakan. Hubungan antara kedua kelompok ini tidak selalu harmonis. Cina Peranakan sering merasa terpinggirkan secara ekonomi oleh Cina Totok, yang kerap mendominasi sektor-sektor bisnis. Sebaliknya, Cina Totok menganggap Cina Peranakan kurang "patriotik" dan tidak mempertahankan budaya Tionghoa dengan baik. Upaya untuk menyatukan kedua kelompok ini sering kali tidak berhasil karena perbedaan budaya yang dalam, yang mengakibatkan ketegangan internal di antara komunitas Tionghoa di Indonesia. Perbedaan ini menyoroti kompleksitas identitas etnis dalam komunitas Tionghoa di Indonesia, yang dipengaruhi oleh sejarah panjang interaksi antara Tionghoa dan masyarakat pribumi serta dinamika politik dan ekonomi yang berkembang di Indonesia.

Dinamika Ekonomi Politik Etnis Tionghoa Masa Orde Baru

Keadaan ekonomi etnis Tionghoa pada masa kepemimpinan Soeharto sangat kompleks dan berlapis. Meskipun mereka menghadapi diskriminasi sosial dan pembatasan budaya, etnis Tionghoa memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di sektor perdagangan, industry, dan keuangan. Peran ini diakui secara luas, namun pada saat yang sama menimbulkan ketegangan dan kecemburuan di kalangan masyarakat pribumi. Etnis Tionghoa yang sejak zaman kolonial sudah dikenal sebagai pedagang dan pengusaha terus mendominasi sektor perdagangan, distribusi, dan manufaktur selama era Orde Baru. Meskipun jumlah mereka relatif kecil diban dingkan dengan populasi pribumi, Tionghoa berhasil memegang kendali atas sebagian besar ekonomi swasta di Indonesia. Mereka menjalankan usaha di berbagai bidang, seperti perdagangan grosir, retail, ekspor impor, perbankan, dan industry. Salah satu fenomena yang menonjol adalah munculnya konglomerat besar yang dimiliki oleh pengusaha Tionghoa. Beberapa konglomerat yang berkembang pesat saat selama era Soeharto antara lain adalah:

1. Liem Sioe Liong (Sudono Salim): beliau adalah pen diri salim group, yang menja di salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Liem memiliki hubungan dekat

dengan Soeharto sejak masa revolusi, dan dengan kedekatan ini, dia mendapatkan akses ke monopoli distribusi tepung terigu melalui PT Bogasari, dan kemu dian memperluas bisnisnya ke berbagai sektor seperti perbankan, property, dan industri makanan.

2. Eka Cipta Widjaja: merupakan pen diri Sinar mas group, yang bergerak di sektor pulp dan kertas, perbankan, serta minyak kelapa sawit dan property. Kekayaan dan kekuasaan pengusaha Tionghoa ini berkembang pesat di bawah dukungan pemerintahan Soeharto.

Kedekatan antara pengusaha Tionghoa besar dengan Soeharto dan kroninya, memungkinkan mereka mendapatkan akses yang eksklusif lisensi bisnis, pinjaman dari bank pemerintah, serta perlindungan politik. Dengan posisi ini, konglomerat dapat berkembang sangat besar dan menguasai berbagai sektor strategis. Namun, walaupun ada pengusaha Tionghoa yang memiliki hubungan baik dengan lingkaran kekuasaan, diskriminasi tetap terja di, terutama bagi etnis Tionghoa yang memiliki akses ke kekuatan. Banyak dari mereka yang berada di kelas menengah dan bawah menghadapi kesulitan dalam mengakses permodalan, terhambat oleh birokrasi, dan seringkali dija dikan sasaran kebijakan-kebijakan ekonomi yang memprioritaskan pribumi. Misalnya, program “kebijakan ekonomi kerakyatan” yang digagas oleh Soeharto bertujuan untuk mengembangkan ekonomi pribumi dengan memberikan dukungan kepada pengusaha pribumi melalui Proyek Koperasi dan Proyek Bina Desa. Meskipun program ini secara resmi bertujuan untuk memajukan ekonomi rakyat, namun dalam prakteknya seringkali mengesampingkan pengusaha Tionghoa kecil dan menengah yang terpaksa berkompetisi dengan lingkungan terbatas.

Di sektor pemerintahan, etnis Tionghoa mengalami pembatasan yang signifikan (Yudono, et al., 2018). Mereka jarang diangkat ke posisi penting di pemerintahan atau militer. Pemerintahan Soeharto mempergunakan kebijakan informal yang membatasi pengangkatan orang Tionghoa dan jabatan public. Hal ini didasarkan pada kecurigaan bahwa etnia Tionghoa lebih setia kepada Cina atau mementingkan kepentingan ekonomi sen diri diban dingkan kepentingan nasional. Namun, di sektor pemerintahan, banyak etnis Tionghoa yang memanfaatkan peluang di sektor ekonomi swasta, terutama dalam perdagangan dan industry. Dengan kemampuan kewirausahaan mereka yang sudah terasa, mereka dapat tetap beroperasi dalam kon disi yang menantang. Banyak dari mereka yang berkembang pesat di sektor bisnis kecil dan menengah, yang kemu dian seringkali diperluas ke perusahaan besar. Sementara itu, kolusi antara pengusaha Tionghoa dan elit politik merupakan salah satu ciri utama ekonomi Indonesia selama masa Orde Baru. Pengusaha Tionghoa yang memiliki hubungan dekat dengan Soeharto atau kroninya, seringkali mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Sebagai imbalanya, mereka memberikan dukungan finansial dan logistik pada rezim Soeharto. Sistem kronisme ini tidak hanya memperkuat posisi pengusaha Tionghoa besar, tetapi juga menimbulkan ketegangan social, karena masyarakat pribumi seringkali merasa bahwa kesempatan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pengusaha Tionghoa yang bekerjasama dengan pemerintahan. Sentimen ini kemu dian digunakan oleh beberapa pihak sebagai alat untuk menggalang dukungan politik terutama pada akhir masa kepemimpinan Soeharto

Selain itu, etnis Tionghoa juga memainkan peran penting dalam Perbankan dan Keuangan. Banyak bank swasta yang dimiliki oleh perusahaan Tionghoa seperti Bank Sentral Asia milik Liem Sioe Liong, Bank International Indonesia milik Eka Cipta Widjaja, serta bank-bank lainnya. Bank-bank ini tidak hanya menja di tulang punggung bagi pengusaha Tionghoa, tetapi juga bagi ekonomi nasional secara keseluruhan. di sisi lain, sektor perbankan juga seringkali menja di tempat terja dinya kolusi dan penyelewengan. Hubungan dekat antar para pengusaha memungkinkan mereka mendapatkan pinjaman besar dari bank milik negara dengan syarat yang longgar. Hal ini menimbulkan masalah-masalah di kemu dian hari, terutama pada saat krisis ekonomi 97-98, ketika banyak konglomerat gagal membayar pinjaman, yang pada akhirnya memperparah krisis ekonomi Indonesia. Meskipun etnis Tionghoa menikmati banyak keuntungan ekonomi, dominasi mereka dalam sektor ekonomi menciptakan kecemburuan di kalangan masyarakat pribumi. Ketegangan ekonomi ini seringkali meluap menja di ketegangan social, terutama pada saat krisis. Puncaknya terja di pada saat kerusuhan 98, dimana etnis Tionghoa menja di sasaran kekerasan dan penjarahan saat kerusuhan menjelang jatuhnya Soeharto. Kerusuhan ini menandai Puncak ketidakpuasan masyarakat pribumi terhadap penguasa Tionghoa yang dianggap terlalu dominan dalam perekonomian, serta ketidaka dilan dalam distribusi kekayaan yang dianggap lebih berpihak kepada etnis Tionghoa daripada pada masyarakat pribumi.

Sementara itu, dalam hal politik, etnis Tionghoa pada masa Soeharto berada dalam posisi yang sangat terbatas dan Marginal. Kebijakan pemerintah Orde Baru secara sengaja menyingkirkan mereka dari kehidupan politik, dengan tujuan untuk mempromosikan Kesatuan Nasional melalui asimilasi, serta mencegah mereka mendapatkan pengaruh politik yang dianggap bisa mengganggu stabilitas rezim. Akibatnya, mereka tidak memiliki akses yang memadai ke kekuasaan politik, dan peran politik mereka dibatasi oleh sejumlah kebijakan diskriminatif (Yudono, et al., 2018). Salah satu karakteristik utama era Orde Baru adalah pembatasan yang ketat terhadap partisipasi politik etnis Tionghoa. Setelah peristiwa G30S/PKI pada 1965, Soeharto mencurigai semua kelompok yang memiliki hubungan dengan atau dianggap dekat dengan komunisme, termasuk etnis Tionghoa, yang secara stereotipe tetap dikaitkan dengan RRT. Kecurigaan ini menyebabkan Soeharto dan pemerintahannya memperketat pengawasan terhadap komunitas Tionghoa. Etnis Tionghoa hampir sepenuhnya dilarang untuk bergabung dengan militer dan birokrasi pemerintahan. Mereka tidak diizinkan untuk menja di anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang pada masa itu sangat dominan dalam struktur kekuasaan Indonesia. Pemerintah khawatir bahwa etnis Tionghoa jika diperbolehkan masuk ke dalam militer akan menimbulkan ancaman bagi stabilitas negara, mengingat kecurigaan terhadap loyalitas mereka kepada Indonesia diban dingkan dengan Tiongkok. di bidang pemerintahan, sangat jarang ada orang Tionghoa yang menduduki posisi tinggi di lembaga negara atau Kementerian. Pemerintahan Soeharto menerapkan kebijakan tidak resmi untuk membatasi etnis Tionghoa dalam jabatan-jabatan public, terutama di posisi strategis yang memiliki kekuasaan politik atau administrative. Partai politik juga jarang memberikan tempat bagi orang Tionghoa untuk mencalonkan diri sebagai kan didat dalam pemilihan umum.

Orde Baru mengonsolidasi kekuatan politiknya melalui Partai Golkar yang menja di kendaraan politik utama bagi Soeharto dan para pendukungnya. Sistem politik ini dikendalikan secara ketat, dan partisipasi politik diatur dengan cara yang memastikan tidak ada oposisi nyata terhadap rezim. Etnis Tionghoa tidak diberikan ruang dalam Golkar dan jarang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam partai politik. Mereka dipandang sebagai kelompok ekonomi, bukan politik, dan oleh karena itu tidak dianggap perlu terlibat dalam proses politik nasional. Dalam konteks ini, orang Tionghoa juga dianggap sebagai minoritas yang sebaiknya berfokus pada kegiatan ekonomi daripada politik. Soeharto berusaha untuk mengurangi keterlibatan mereka dalam politik demi menjaga stabilitas, dengan pandangan bahwa jika Tionghoa terlalu terlibat dalam politik, hal itu bisa memicu ketegangan sosial dengan kelompok pribumi. Selain pembatasan partisipasi politik formal, etnis Tionghoa juga sering menja di korban stigmatisasi politik. Pemerintah, melalui propaganda dan retorika, seringkali mengaitkan etis Tionghoa dengan ancaman komunis atau asing. Meskipun tuduhan ini seringkali tidak berdasar, mereka digunakan untuk memobilisasi hubungan politik dari kelompok pribumi dan memperkuat kekuasaan Soeharto. Ketika krisis ekonomi dan politik melanda Hin dia Belanda di Indonesia pada 98, stigmatisasi ini meledak menja di kekerasan politik yang menargetkan komunis Tionghoa. Pada saat kerusuhan 98, etnis Tionghoa menja di sasaran kekerasan massal termasuk penjarahan, pembakaran, dan serangan fisik. Peristiwa ini menunjukkan kerentetan politik etnis Tionghoa, meskipun mereka memiliki peran ekonomi yang penting, mereka tetap menja di kambing hitam dalam krisis politik dan social (Fittrya, 2013).

Banyak orang Tionghoa, terutama setelah menyaksikan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, memilih untuk menghindari politik sama sekali. Mereka lebih memilih untuk fokus pada kegiatan ekonomi atau Pen di dikan, dan berusaha untuk tetap berada di luar radar politik untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini menciptakan pola perilaku politik di kalangan komunis Tionghoa yang bertahan hingga bertahun-tahun. Secara keseluruhan, keadaan politik etnis Tionghoa dibawah kepemimpinan Soeharto ditandai oleh eksklusif sistematis dari partisipasi politik formal. Mereka dihadapkan pada diskriminasi pembatasan dalam karir politik dan militer serta kewajiban administrasi yang menambah beban. Meskipun beberapa pengusaha Tionghoa yang kaya memiliki akses kekuasaan melalui hubungan pribadi dengan Soeharto, mayoritas komunitas Tionghoa tetap berada di pinggiran politik. Bahkan ketika mereka memainkan peran ekonomi yang penting, mereka tetap menja di korban dari stigma diskriminasi dan kekerasan politik yang memuncak pada kerusuhan 1998.

Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Pada masa Orde Baru (1966-1998), pemerintahan Indonesia menerapkan berbagai kebijakan yang secara khusus mengatur dan membatasi ruang gerak etnis Cina. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah

1. Asimilasi dan pembatasan identitas: melalui Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 Aryani, 2022), pemerintah melarang semua bentuk perayaan keagamaan, adat istiadat, dan kegiatan budaya Tionghoa di ruang public. Etnis Tionghoa

- diminta untuk mengasimilasi diri dengan budaya Indonesia dan menghindari pengungkapan identitas budaya mereka secara terbuka.
2. Pembatasan nama: berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 240 tahun 1967, etnis Tionghoa dianjurkan mengganti nama Tionghoa mereka dengan nama yang lebih berbau Indonesia, sebagai bentuk upaya asimilasi. Nama-nama Tionghoa dianggap sebagai simbol perbedaan etnis dan perlu disesuaikan dengan identitas nasional.
 3. Pengendalian warga asing: Keputusan Presiden Nomor 240 tahun 1967 (Oh, 2016) juga mengatur tentang kewarganegaraan etnis Tionghoa. Mereka harus memilih status kewarganegaraan, apakah menja di warga Indonesia atau menja di warga negara Tiongkok. Mereka yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang jelas seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti pen di dikan dan pekerjaan
 4. Surat bukti kewarganegaraan republik Indonesia: pemerintah Orde Baru mewajibkan etnis Tionghoa untuk memiliki sbkri sebagai bukti kewarganegaraan, meskipun banyak diantara mereka yang telah menja di WNI. Hal ini sering kali menyebabkan diskriminasi administrative, dimana etnis Tionghoa kesulitan dalam mengakses layanan publik seperti pembuatan KTP, paspor, atau masuk ke institusi pendidikan.
 5. Pembatasan di sektor ekonomi dan politik: di bidang politik, etnis Tionghoa dilarang terlibat dalam kegiatan politik dan dibatasi hak-haknya untuk menja di pejabat publik atau militer. Mereka tidak boleh bergabung dalam partai politik atau menja di anggota parlemen. Sementara itu, di sektor ekonomi, meskipun banyak etnis Tionghoa yang aktif di dalam dunia usaha, kebijakan pemerintah membatasi etnis Tionghoa untuk dalam beberapa sektor tertentu yang dianggap strategis, terutama terkait perusahaan milik negara atau sektor yang dikuasai pemerintah
 6. Penghapusan sekolah dan me dia berbahasa Mandarin: pemerintah menutup sekolah-sekolah Tionghoa dan melarang penerbitan koran atau me dia yang menggunakan bahasa Mandarin (Suryani dan Azmi, 2016). Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong asimilasi budaya dan memotong akses generasi muda Tionghoa terhadap warisan budaya leluhur mereka. Kebijakan-kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Orde Baru untuk menciptakan Kesatuan Nasional, meskipun berdampak negatif terhadap Indonesia dan hak-hak warga negara etnis yang ada di Indonesia.

Diskriminasi dan Kerusakan Etnis Tionghoa Masa Orde Baru

1. Kerusakan Mei 1998

Kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Indonesia, terutama bagi etnis Tionghoa. Kerusakan ini terja di pada saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang parah dan gejolak politik besar yang kemu dian memuncak dengan turunnya Presiden Soeharto dari kekuasaan. Peristiwa ini dilatar belakangi pada tahun 1997-1998, dimana Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sangat serius. Nilai tukar Rupiah jatuh, harga kebutuhan pokok melonjak, dan banyak bisnis bangkrut. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Soeharto semakin besar. Pada saat yang sama, etnis Tionghoa sering kali dianggap menguasai sektor ekonomi, meskipun banyak dari mereka juga

mengalami kesulitan akibat krisis. Pada Mei 1998, terjadi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah kota di Indonesia. Di Jakarta, Solo, Medan, dan beberapa kota lainnya, demonstrasi berubah menjadi kerusuhan besar. Pada 13-15 Mei (Hutahaean, 2014), kekerasan dan penjarahan terjadi di mana toko-toko dan properti milik etnis Tionghoa menjadi sasaran. Salah satu aspek paling tragis dalam kerusuhan ini adalah kekerasan fisik dan seksual yang menimpa perempuan etnis Tionghoa. Banyak laporan yang menyebutkan pemerkosaan dan pelecehan terhadap perempuan Tionghoa selama kerusuhan berlangsung. Selain kekerasan terhadap individu, properti milik etnis Tionghoa juga dirusak dan dijarah. Toko, pusat perbelanjaan, dan rumah-rumah dibakar, terutama di Jakarta dan Solo. Kerusuhan ini memicu gelombang ketakutan di kalangan etnis Tionghoa. Banyak yang meninggalkan Indonesia untuk sementara waktu atau secara permanen. Selain itu, peristiwa ini juga memicu tuntutan reformasi dan penegakan HAM di Indonesia. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari kursi presiden.

Diantara daerah lain di Indonesia, kerusuhan 98 paling tragis terjadi di Jakarta dan Solo, meskipun ada juga kerusuhan di kota-kota yang lainnya. Beberapa faktor yang menjelaskan mengapa kerusuhan di kedua kota ini menjadi lebih menonjol di antara yang lain adalah Jakarta sebagai ibukota negara menjadi pusat perhatian karena di sanalah pusat kekuasaan politik dan ekonomi. Protes-protes yang terjadi di Jakarta sebagian besar diarahkan pada simbol-simbol kekuasaan seperti gedung-gedung pemerintahan, kantor DPR atau MPR, dan tempat-tempat yang dianggap sebagai simbol dari politik. Ketidakpuasan terhadap rezim Orde Baru memuncak di Jakarta sehingga kekacauan lebih menjadi intens di sana, sementara untuk Solo, Solo dikenal sebagai basis massa politik dan budaya yang kuat dengan sejarah gerakan massa yang panjang. Konflik sosial di Solo juga dipicu oleh ketimpangan ekonomi dan politik lokal, dan terpengaruh oleh dinamika nasional. Jakarta dan Solo memiliki populasi etnis Tionghoa yang signifikan.

Pada masa Orde Baru etnis Tionghoa sering dijadikan kambing hitam atas ketidakpuasan ekonomi masyarakat (Himawan, et al., 2022). Mereka dianggap sebagai kelompok yang makmur yang memicu kecemburuan dan akhirnya menimbulkan serangan rasial terhadap toko-toko dan properti milik mereka selama kerusuhan. Krisis ekonomi 97-98 menyebabkan ketidakpuasan yang besar di Jakarta, sebagai pusat ekonomi nasional, dampak dari krisis ini sangat terasa, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah. Sementara itu, di Solo, tingkat kemiskinan juga tinggi dan ketika kerusuhan terjadi hal ini memperparah situasi. Di Jakarta, mahasiswa dari berbagai Universitas memobilisasi demonstrasi besar-besaran yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan setelah direspon dengan kekerasan oleh aparat keamanan. Sementara di Solo, protes dan kerusuhan lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok massa yang terorganisir, serta ketegangan sosial yang sudah lama ada. Situasi politik yang tidak stabil di tingkat nasional, terutama setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei, memperburuk kondisi keamanan di Jakarta dan Solo. Ketidakpastian mengenai masa depan politik Indonesia menciptakan vacuum of power yang membuat kerusuhan lebih sulit dikendalikan. Jakarta dan Solo menjadi pusat perhatian karena simbolisme politik dan sosial yang mereka miliki, serta dampak kerusuhan yang sangat besar terhadap komunitas etnis Tionghoa di kedua kota tersebut.

2. Peristiwa Malari 1974

Peristiwa Malari terjadi pada 15 Januari 1974, dan awalnya merupakan aksi demonstrasi mahasiswa yang memprotes kebijakan pemerintah Orde Baru yang dianggap terlalu memihak investasi asing, terutama dari Jepang (Jazimah, 2013). Peristiwa ini terjadi akibat rivalitas dua kubu militer Orde Baru, yaitu kelompok Jenderal Soemitro dan kelompok Ali Moertopo. Soemitro yang berkuasa sebagai Pangkopkamtib cenderung mendukung gerakan mahasiswa yang menolak modal asing, terutama dari Jepang, sebagai strategi untuk melemahkan lawan politiknya, Ali Murtopo. Ali, di sisi lain, memanfaatkan kerusuhan dengan menggerakkan preman, tukang becak, dan simpatisan lainnya untuk memicu kekacauan, bertujuan men diskreditkan Soemitro dan gerakan mahasiswa. Mahasiswa juga mengkritik ketergantungan Indonesia pada modal asing, khususnya dari Jepang, yang memicu sentimen anti asing dan anti Tionghoa. Peristiwa ini juga melibatkan ketidakpuasan rakyat dan juga mahasiswa terhadap kebijakan ekonomi Orde Baru, khususnya UU penanaman modal asing, yang dianggap merugikan ekonomi lokal dan menguntungkan perusahaan asing. Mahasiswa memimpin aksi dengan isu anti korupsi dan penolakan terhadap dominasi modal asing (Suwirta, 2018). Pada 15 Januari 1974, ribuan mahasiswa turun ke jalan di Jakarta saat perdana menteri Jepang mengunjungi Indonesia. Kerusuhan yang terjadi bersamaan dengan kunjungan perdana menteri Jepang, sehingga hal tersebut kerusuhan. Demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi kekerasan ketika massa mulai menyerang dan merusak toko-toko dan properti milik warga keturunan Tionghoa. Toko-toko, kendaraan, dan properti milik orang-orang Tionghoa dijarah dan dibakar. Sentimen anti Tionghoa muncul karena anggapan bahwa etnis ini diuntungkan dari investasi Jepang dan ekonomi Indonesia. Polisi dan militer turun tangan untuk memulihkan ketertiban, tetapi kekerasan berlangsung selama beberapa hari. Peristiwa ini berujung pada tindakan keras dari pemerintah terhadap kelompok mahasiswa dan beberapa tokoh penting seperti Jenderal Soemitro, dicopot dari jabatannya. Sentimen dalam peristiwa ini menambah ketegangan rasial yang sudah ada. Secara keseluruhan, Malari 1974 adalah hasil dari pertikaian internal elit militer, ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi, serta kerusakan yang diperparah oleh infiltrasi elemen luar ke dalam demonstrasi mahasiswa.

3. Kerusuhan di Medan tahun 1994

Kerusuhan ini juga melibatkan kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Ketidakpuasan sosial ekonomi yang meluas di Medan menjadi pemicu utama kerusuhan ini. Kesenjangan ekonomi yang dirasakan antara kelompok etnis Tionghoa dan penduduk lokal menyebabkan ketegangan. Etnis Tionghoa seringkali dianggap sebagai kelompok yang lebih kaya dan menguasai perdagangan lokal, meskipun kenyataan ini tidak berlaku untuk seluruh komunitas Tionghoa. Kerusuhan di Medan dimulai dengan sebuah demonstrasi di sebuah pabrik pada 14 April 1994 (Legowo, 2016). Para pekerja menuntut upah dan kondisi kerja yang lebih baik. Namun, demonstrasi tersebut kemudian dengan cepat berubah menjadi kekerasan yang meluas dan menasar properti milik etnis Tionghoa. Toko-toko dijarah, dan kendaraan-kendaraan dirusak. Dalam kerusuhan yang berlangsung selama 2 hari tersebut beberapa orang terbunuh dan yang lainnya luka-luka. Meskipun kekerasan tidak seintens kerusuhan 1998, peristiwa ini mencerminkan

ketegangan sosial yang mendalam di Medan. Peristiwa ini menja di bukti bahwa penerapan undang-undang ketenagakerjaan melalui system tripartit tidak berfungsi secara efektif. Dalam peristiwa ini terdapat beberapa hal yang dicurigai menja di pemicu kerusuhan, yaitu

1. Pengaruh media: outline berita dilaporkan menerbitkan konten yang terkesan bermusuhan dengan etnis Tionghoa, sehingga berpotensi memicu ketegangan
2. Kurangnya respon yang tepat: pihak berwenang dianggap tidak cukup mengatasi kekhawatiran pekerja, sehingga hal ini mungkin memperburuk situasi
3. Hasutan yang terorganisir: ada in dikasi adanya upaya terorganisir untuk menghasut kerusuhan, termasuk pembagian selebaran yang menyerukan pemogokan kerja. Seperti kerusuhan lainnya, peristiwa ini meningkatkan rasa ketakutan di kalangan komunitas Tionghoa di Medan. Banyak dari mereka kemudian memperketat keamanan atau pindah ke luar negeri.

Kerusuhan di Jawa Tengah 1980

Kerusuhan rasial di Jawa Tengah pada tahun 1980, juga dikenal sebagai kerusuhan Urip Sumoharjo atau warung pelem, merupakan serangkaian peristiwa yang dipicu oleh ketegangan etnis antara komunitas Jawa dan Tionghoa. Peristiwa ini bermula dari konflik skala kecil di Solo, di mana ketegangan antara pemuda dari kelompok etnis Jawa Tengah dan Tionghoa memicu perselisihan yang akhirnya membesar akibat berbagai faktor sosial dan ekonomi yang telah lama ada. Ketegangan ini bukanlah hal yang muncul tiba-tiba, melainkan merupakan faktor akumulasi dari berbagai sentimen dan ketidakpuasan yang telah lama ada. Faktor ekonomi sering menja di pemicu utama, dimana komunitas Tionghoa sering dianggap lebih unggul dalam bidang perdagangan dan ekonomi, sehingga menciptakan kecemburuan di kalangan masyarakat lainnya. di sisi lain, kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan kesetaraan sosial dan ekonomi turut memperburuk keadaan. Ketika konflik di Solo semakin memanas, ketegangan ini kemudian menyebar ke kota-kota lain di Jawa Tengah termasuk Semarang. di Semarang, kerusuhan mencapai puncak dengan aksi kekerasan yang meluas. Masa yang marah melakukan penjarahan, pembakaran, dan perusakan terhadap properti milik etnis Tionghoa. Rumah, toko, dan kendaraan menja di sasaran utama kemarahan, hingga meninggalkan jejak kehancuran dan rasa takut yang mendalam di kalangan komunitas Tionghoa. Kerusuhan ini menelan banyak korban jiwa dan luka-luka, baik yang ringan maupun serius. Selain kerugian fisik, dampak psikologi dari peristiwa ini juga sangat besar, Rasa trauma dan ketakutan menciptakan jurang yang lebih dalam antar komunitas, menghambat upaya rekonsiliasi dan menambah ketegangan social. Kerusuhan Jawa Tengah pada tahun 1980 ini adalah pengingat akan bahaya dari prasangka dan ketidakadilan, serta pentingnya usaha bersama untuk membangun jembatan pemahaman, dan saling menghormati antara berbagai kelompok etnis di Indonesia.

Secara keseluruhan, kerusuhan-kerusakan ini menunjukkan bagaimana etnis Tionghoa menja di sasaran kekerasan sosial dan politik di Indonesia, khususnya selama masa Orde Baru. Mereka sering dianggap sebagai kambing hitam atas berbagai masalah ekonomi dan social, meskipun mereka sendiri juga menja di korban dari kebijakan diskriminatif dan ketidakstabilan politik. Ketegangan ini diperburuk oleh kebijakan pemerintah Orde Baru yang cenderung memperkuat

stereotype negatif terhadap etnis Tionghoa dan membatasi hak-hak sosial dan budaya mereka.

Kesimpulan

Pembahasan menegaskan bahwa identitas etnis Tionghoa di Indonesia sangat kompleks, dengan perbedaan mendalam antara kelompok cina totok dan Cina peranakan yang mencerminkan dinamika asimilasi dan pemeliharaan budaya leluhur. Meskipun kebijakan Orde Baru berusaha menghilangkan perbedaan etnis melalui asimilasi paksa, ketegangan sosial dan diskriminasi tetap muncul terutama pada masa-masa krisis ekonomi, seperti yang terlihat dalam kerusuhan Mei 1998. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun komunitas Tionghoa berperan penting dalam ekonomi Indonesia, mereka sering menja di kambing hitam atas ketidakpuasan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil, guna mengurangi ketegangan sosial dan mendorong rekonsiliasi atas kelompok etnis di masa depan.

Referensi

- Atabik, A. (2016). Percampuran budaya Jawa dan Cina: Harmoni dan toleransi beragama masyarakat Lasem. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 11(1), 1-11. <https://doi.org/10.14710/sabda.11.1.1-11>.
- Fitrya, L. (2013). Tionghoa dalam diskriminasi Orde Baru tahun 1967-2000. *Jurnal AVATARA*, 1(2), 159-166.
- Himawan, E. M., Pohlman, A., & Louis, W. (2022). Memahami dinamika psikologis individu yang turut terlibat dalam kerusuhan massa Mei 1998: Sebuah kerangka psikologis. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 9(1), 9-34. 158-178. <https://doi.org/10.24854/jpu464>.
- Hutahaean, J. (2014). Dampak Kerusuhan Mei 1998 Terhadap Pengu-Saha Etnis Tionghoa di Petukangan Jakarta Tahun 1998-2003. *Journal of Indonesian History*, 3(1), 27-33. <https://journal.unnes.ac.id/sju/jih/article/view/3880>.
- Jazimah, I. (2013). MALARI: Satu di Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 3(1), <https://doi.org/10.25273/ajsp.v3i01.902>.
- Legowo, W. K. (2016). Konflik dan Integrasi, Sebuah Kajian Awal: Kasus Kerusuhan Medan, April 1994. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 3(1), 68-77. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v3i1.34>.
- Oh, H. (2016). Ambivalensi Kebijakan Pemerintah Orde Baru tentang Golongan Etnis Tionghoa: Suatu Tinjauan Keputusan Presi dium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. *Ilmu dan Budaya*, 40(49), 5637-5650. <https://doi.org/10.47313/jib.v40i49.249>.
- Suryani, M. S., & Ana Sabhana Azmy, M. (2016). POLITIK IDENTITAS DAN NASIONALISME KEBANGSAAN (Studi Atas Penguatan Politik Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia Pasca Orde Baru). *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Suwirta, A. (2018). Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Peristiwa MALARI Tahun 1974 dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka dan Indonesia Raya di Jakarta. *SUSURGALUR*, 6(1), 73-98.
<https://doi.org/10.2121/susurgalur.v6i1.986>.
- Triwahyuni, A., Kurniawan, P. W., & Siska, Y. (2022). Peranan Laksamana Cheng Ho Dalam Hubungan Diplomatik China Dengan Kerajaan Sriwijaya. *Palapa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pen di dikan Sejarah*, 4(1), 1-16.
<https://eskripsi.stkipgribl.ac.id/index.php/palapa/article/view/502>
- Wibowo, G. A. (2017). Ekonomi Etnis Cina Di Surakarta Selama Orde Baru. *SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kepen di dikan*, 4(1), 57-68.
<https://ejurnalunsam.id/index.php/jsnbl/article/view/1091>
- Yudono, R. M., Situmeang, N., & Astuti, W. R. D. (2018). Peran Serta Etnis Tionghoa dalam Politik Indonesia Pasca Refomasi. In *Prosing Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.